UPAYA DERADIKALISASI MELALUI PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA TERORIS BERBASIS INTELIJEN

Ludi Oktadhika

Politeknik Ilmu Pemasarakatan
email: oktadhikaludi@gmail.com

Abstract

*Until this moment optimization and development of coaching programs to terrorist inmates is always implemented. Programs that have been carried out under the Directorate General of Corrections that are integrated with other institutions or institutions such as the National Counterterrorism Agency are on target and have a good impact. But in reality the spread of terrorism is still happening inside the correctional institution, so it raises the big question of how this problem can happen in a place that is fully under surveillance, security, and coaching implemented. Fighting terrorism does not mean responding physically or visually but fighting the ideology contained in terrorists and of course terrorist inmates in correctional institutions. Deradicalization is a new formula for suppressing radicalization. The concept of this program is intended to change the attitude or precept of terrorist inmates from radical attitudes to more tolerant attitudes. But this deradicalization will be more optimized with the inclusion of sharia intelligence-based coaching. The study aims to analyze efforts to de-elect the intelligence-based terrorist inmate program. The method used in this study is with an empirical juridical approach that is evaluative (the law is seen as the norm or *das sollen*). The results showed that the handling of terrorist inmates namely deradicalization has been a maximum effort, especially in terms of Standard Operational Procedures that have been established in such a way as to place terrorist inmates in accordance with the category in accordance with the assessment results.*

Keywords: *coaching; terrorist inmates; deradicalization; Intelligence*

Abstrak

Hingga detik ini pengoptimalan dan pengembangan program pembinaan kepada narapidana teroris selalu dilaksanakan. Program-program yang telah diusung di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang terintegrasi dengan institusi atau lembaga lainnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sudah tepat sasaran dan berdampak baik. Namun pada kenyataannya penyebaran paham terorisme masih

terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga menimbulkan pertanyaan besar bagaimana masalah ini bisa terjadi pada tempat yang sepenuhnya dalam pengawasan, pengamanan, dan pembinaan dilaksanakan. Melawan terorisme bukan berarti memberikan respon secara fisik atau visual tetapi memerangi ideologi yang terdapat pada diri teroris dan tentunya narapidana teroris di dalam lembaga pemasyarakatan. Deradikalisasi adalah suatu formula baru untuk meredam radikalisasi. Secara konsep program ini ditujukan untuk mengubah sikap atau persepsi narapidana teroris dari sikap yang radikal kepada sikap yang lebih toleran. Namun deradikalisasi ini akan lebih dioptimalkan dengan disertakannya pembinaan berbasis intelijen syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya deradikalisasi program narapidana teroris berbasis intelijen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat evaluatif (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan narapidana teroris yakni deradikalisasi sudah merupakan upaya yang maksimal terutama dari segi Standar Operasional Prosedur yang telah dibentuk sedemikian rupa salah satunya dengan penempatan narapidana teroris sesuai dengan kategori sesuai dengan hasil asesmen.

Kata Kunci: pembinaan; narapidana teroris; deradikalisasi; intelijen

Pendahuluan

Dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta tata cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik (Indonesia, n.d.). Sedangkan lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Kendati demikian petugas pemasyarakatan dituntut bukan hanya menerima pelaku tindak pidana saja namun juga bertanggung jawab atas kondisi baik fisik maupun psikologis dari narapidana itu sendiri.

Pelaksanaan pembinaan kepada narapidana, sistem pemasyarakatan berpedoman pada Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan yang terbentuk dalam Konferensi Lembang yang saat ini dijadikan sebagai dasar kode etik dalam memperlakukan narapidana, yang salah satunya berbunyi "Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk / lebih jahat daripada ia sebelum masuk lembaga." Oleh karena itu adanya pemisahan yang dilakukan kepada: (Hasanuddin Massaile, Dindin Sudirman, 2014).

- 1) Yang residivis dan yang bukan.
- 2) Yang tindak pidana berat dan yang ringan.

- 3) Macam tindak pidana yang dilakukan.
- 4) Dewasa, dewasa muda, dan anak-anak.
- 5) Laki-laki dan wanita.
- 6) Orang terpidana dan orang tahanan / titipan.

Dengan demikian adanya pemisahan antara narapidana teroris dengan narapidana lainnya. Namun narapidana teroris dikategorikan narapidana high risk. Disebutkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan high risk adalah narapidana yang memenuhi kategori:

- 1) Membahayakan keamanan negara.
- 2) Membahayakan keselamatan masyarakat.

Berangkat dari narapidana high risk, prinsip penempatan narapidana berbahaya pada Lapas High Risk, meliputi:

- 1) Penempatan didasarkan pada hasil penilaian / assesment, sehingga diketahui tingkat resiko dan kategori narapidana. menempatkan narapidana yang paling buruk dari yang terburuk (worst of the worst).
- 2) Pengamanan dan pengawasan dilakukan secara maksimal, aktivitas dan perilaku narapidana dipantau secara maksimal, aktivitas dan perilaku narapidana dipantau secara terus-menerus selama 24 jam.
- 3) Akses terhadap publik terbatas, layanan kunjungan diberikan dengan tidak tatap temu langsung namun menggunakan sistem teknologi informasi.
- 4) Penempatan ruangan, satu orang narapidana ditempatkan dalam satu kamar (one man, one cell) untuk mencegah dalam keadaan tertentu dapat membahayakan orang lain dan / atau petugas.
- 5) Interaksi dan komunikasi dengan petugas sangat dibatasi.

Mekasnisme yang tepat sangat diperlukan dalam penanganan narapidana teroris di dalam Lapas. Pemberian layanan pembinaan terhadap narapidana teroris bertujuan agar narapidana teroris tersebut dapat memiliki suatu sudut pandang berbeda mengenai kehidupan bermasyarakat dan menerima segala perbedaan. Akan tetapi, sebelum pemberian pembinaan dan intervensi dilaksanakan, diperlukan adanya program asesmen narapidana risiko tinggi terhadap narapidana teroris yang bersangkutan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris yang bersifat evaluatif (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan huum primer maupun bahan hukum sekunder). Penelitian ini difokuskan

pada evaluasi pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan terhadap narapidana teroris.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan di lapangan sedangkan data sekunder bersumber pada peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hasil penelitian dan buku-buku literatur terkait dengan judul penelitian

Hasil dan Pembahasan

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan / atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif, ideologi, politik atau gangguan keamanan (Indonesia, 2018).

Pada dasarnya keterlibatan seseorang terhadap terorisme meliputi banyak faktor. Tidak ada profil khusus yang membedakan teroris dan populasi masyarakat pada umumnya. Terdapat studi yang pernah dilakukan kepada pelaku teroris, dan hasilnya adalah bahwa teroris merupakan orang normal pada umumnya, dengan rata-rata IQ normal dan tidak memiliki tanda psikopat atau gejala-gejala psikotik. Adapun faktor yang seseorang terlibat dalam terorisme, meliputi: (Abbas, 2007).

Motivasi untuk terlibat dalam terorisme:

- a. Kebutuhan kuat untuk menerapkan hukum Islam (Syariat) di Indonesia.
- b. Keinginan untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang dipresepsikan tidak adil dan tidak benar menurut Islam.
- c. Tidak puas dengan kondisi masyarakat saat ini yang tidak menurut ajaran Islam.
- d. Pemaknaan jihad yang sempit dengan berperang melawan semua non-muslim.

Proses bergabung dengan kelompok teroris:

- a. Bertemu dengan orang yang telah terlibat.
- b. Terjadi ketika belajar di institusi pendidikan Islam khusus.
- c. Keyakinan bahwa mereka adalah satu-satunya kelompok yang benar di mata Tuhan.

- d. Kekerasan diperbolehkan untuk mempertahankan Islam jika tidak ada cara yang lain.
- e. Direkrut sebagai anggota eksklusif dari organisasi radikal oleh keluarga, orang terdekat, bahkan orang lain yang telah menjadi anggota kelompok tersebut.

Dorongan fanatisme untuk meninggal sebagai seorang martir (syuhada):

- a. Tidak ada tanda eksplisit untuk melakukan bunuh diri di antara para partisipan, akan tetapi mereka bersedia meninggal dunia untuk menghadirkan hukum syariat.
- b. Komitmen untuk meninggal dunia adalah bagian dari komitmen kelompok, bukan komitmen individu (depersonalisasi).
- c. Kematian merupakan pilihan yang lebih baik bagi mereka.

Tekanan kelompok:

- a. Anggota yang tidak sejalan dengan misi kelompok dianggap sebagai pengkhianat, diisolasi, dan dianggap sebagai musuh.
- b. Tekanan terjadi baik di dalam penjara/rumah tahanan maupun di luar.
- c. Ayat Alquran diinterpretasikan secara harfiah untuk menghasilkan persepsi semua orang di luar kelompok mereka adalah kafir dan thogut.
- d. Apabila ada narapidana yang bekerja sama dengan polisi maka akan mendapatkan tekanan berupa ancaman.

Rasionalisasi kekerasan:

- a. Ayat Alquran dan hadis diinterpretasikan sedemikian rupa untuk membenarkan hukuman terhadap orang-orang kafir dan thogut.
- b. Hukum syariat harus ditegakkan. Jika tidak ada cara lain, kekerasan dibenarkan.

Presepsi keagamaan dan ideologi politik:

- a. Agama dipersepsikan sebagai pembimbing hidup, termasuk politik. Dengan demikian Islam juga dianggap sebagai ideologi politik.
- b. Presepsi mereka mengenai agama dan ideologi adalah monolitik.

Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Deradikalisasi dilaksanakan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, serta orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme.

Deradikalisasi merupakan program yang diajukan oleh seorang penulis bernama Sarlito Wirawan Sarwono yang mengungkapkan studi pertama bahwa teroris merupakan orang-orang normal dan sehat secara mental, Sarwono menyimpulkan bahwa sangatlah mungkin untuk mengubah ideologi kekerasan radikal jihad mereka menjadi tidak terlalu radikal. Ideologi merupakan suatu pengetahuan dan sikap mental yang dipelajari. Ideologi tidaklah diberikan

atau dilahirkan. Oleh karena dipelajari, ideologi secara teoritis seharusnya memungkinkan untuk diubah melalui pendidikan, pelatihan, atau program intervensi lain yang sistematis.

Kemudian Sarwono mengajukan program pelatihan deradikalisasi sebagai suatu studi pendahuluan bagi mantan teroris kepada Universitas Indonesia, melalui Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Tujuan dari studi ini adalah meningkatkan keamanan nasional dengan mengurangi tingkat radikalisme Islam di antara narapidana di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Begitu juga dengan orang-orang yang telah dibebaskan.

Universitas Indonesia menerima proposal yang diajukan oleh Sarwono dan dilaksanakan pada tahun 2009 yang dalam pelaksanaannya Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia (LPPsi UI) berkolaborasi dengan beberapa pihak yakni, Pusat Studi Alquran (PSQ), Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama, Divisi Detasemen 88 / Anti-terorisme POLRI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Yayasan Panti Asuhan Muslimin yang menyediakan fasilitas untuk diskusi dari mantan pidana. (S. W. Sarwono, 2013).

Asumsi dari radikalisme adalah terorisme merupakan suatu perilaku berdasarkan pada sikap radikal. Sikap tersebut bukan bawaan sejak lahir. Sikap adalah sesuatu yang dipelajari. Sikap berubah dari waktu ke waktu, bergantung pada kondisi internal dan eksternal individu (Zaltman et al., 1972). Dalam kasus terorisme, hipotesisnya adalah sikap radikal yang dipelajari dapat dipelajari ulang untuk mengurangi / menghilangkannya melalui sebuah intervensi pelatihan.

Harapannya pada saat studi ini dilakukan akan berhasil, studi ini akan dijadikan sebuah model bagi pemuka agama Islam bagi petugas pemasyarakatan untuk mengembangkan intervensi yang berhubungan dengan narapidana dan tahanan teroris agar dapat mendorong dan menumbuhkan motivasi mereka ke arah ideologi Islam yang kurang radikal dan kurang merusak.

Program asesmen narapidana risiko tinggi adalah suatu program yang ditujukan untuk menilai atau meneliti narapidana mengenai tingkat resiko kekerasan atau tindak pidana yang dilakukannya. Output dari program asesmen narapidana resiko tinggi adalah klasifikasi narapidana berkaitan dengan resiko pengulangan pidana (Hasanuddin Massaile, Dindin Sudirman, 2014).

Pemenuhan asesmen narapidana resiko tinggi guna mengklasifikasi program pembinaan dan kebijakan pengamanan yang akan diberikan, dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menilai resiko pengulangan tindak pidana teroris.

- 2) Menentukan penilaian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor kebutuhan (criminogenic) dari narapidana teroris.
- 3) Pedoman dalam penyusunan program pembinaan (case plan).
- 4) Pedoman dalam menentukan penempatan, tingkat pengamanan yang sesuai bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan dan berkontribusi pada persiapan reintegrasi yang aman ke dalam masyarakat.
- 5) Pedoman dalam menentukan program dan pelaksanaan reintegrasi narapidana teroris oleh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.

Sasaran dari assesmen narapidana resiko tinggi sebagaimana dilakukan juga terhadap narapidana lainnya dilaksanakan terhadap narapidana ekstrim politik, ideologis, atau berdasarkan agama.

Narapidana risiko tinggi didefinisikan sebagai tahanan yang dinilai mempunyai risiko signifikan terkait: (Atabay, 2016)

- 1) safety; membahayakan diri, narapidana lain atau pegawai atau pengunjung Lapas;
- 2) stability; ancaman terhadap ketertiban di penjara/provokator, tidak kooperatif
- 3) security; kemungkinan melarikan diri
- 4) reoffending; melakukan pelanggaran berat/serius lain kembali setelah bebas dan
- 5) society; tahanan yang masih mempunyai hubungan terkait dengan organized crime, ideologi terorisme, jaringan perdagangan narkoba, atau yang mempunyai uang dan kekuasaan untuk mempengaruhi.

Selain yang mempunyai risiko tersebut di atas ada beberapa kelompok narapidana lainnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka klasifikasi narapidana berdasarkan risiko, yakni:

- 1) Violent extremist prisoners;
- 2) Anggota geng atau kelompok organisasi massa tertentu;
- 3) Anggota dari kelompok pelaku kejahatan terorganisir;
- 4) Tahanan;
- 5) Mantan kombatan;
- 6) Narapidana dengan masa pidana panjang serta hukuman mati/seumur hidup.

Tipologi Narapidana teroris terbagi atas empat tipologi. Adapun keempat tipologi tersebut meliputi ideolog, militan, pengikut, dan simpatisan dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Ideolog:
 - a. Sebagai rujukan narapidana teroris lain.
 - b. Pengetahuan agama yang mumpuni.
 - c. Banyak kunjungan.
 - d. Dukungan logistik tinggi.

- 2) Miliran:
 - a. Mempunyai kemampuan militer.
 - b. Sebagai pelindung kelompok.
 - c. Komitmen ideologi kuat.
- 3) Pengikut:
 - a. Bukan orang yang terlalu berpengaruh dalam kelompok.
 - b. Bertugas melayani.
 - c. Komitmen ideologi belum tinggi.
- 4) Simpatikan:
 - a. Hampir tidak mempunyai pengaruh.
 - b. Lebih sering menjadi pesuruh.
 - c. Komitmen ideologi rendah.

Pada dasarnya walaupun narapidana teroris memiliki ideologi yang sama dengan narapidana teroris yang lainnya, bukan berarti sikap dan perilaku mereka sama. Adapun pembagian kategori sikap dan perilaku narapidana teroris terbagi atas empat kategori, meliputi:

- 1) Sangat Kooperatif:
 - a. Bersedia berkomunikasi dengan petugas.
 - b. Mengikuti program pembinaan di lapas.
 - c. Mengikuti program deradikalisasi BNPT dan program intervensi lainnya.
 - d. Bersedia berikrar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menandatangani.
 - e. Mendukung dan bekerjasama dengan pemerintah untuk bersama-sama menanggulangi ekstrimisme kekerasan.
- 2) Kooperatif:
 - a. Bersedia berkomunikasi dengan petugas.
 - b. Mengikuti program pembinaan di lapas.
 - c. Mengikuti program deradikalisasi BNPT dan program intervensi lainnya.
 - d. Bersedia berikrar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menandatangani.
- 3) Tidak kooperatif:
 - a. Tidak bersedia berkomunikasi dengan petugas.
 - b. Tidak mau mengikuti program pembinaan di lapas.
 - c. Tidak mau mengikuti program deradikalisasi BNPT dan program intervensi lainnya.
 - d. Tidak bersedia berikrar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menandatangani.
- 4) High Risk
 - a. Tidak bersedia berkomunikasi dengan petugas.

- b. Tidak mau mengikuti program pembinaan di lapas.
- c. Tidak mau mengikuti program deradikalisasi BNPT dan program intervensi lainnya.
- d. Tidak bersedia berikrar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menandatangani
- e. Melakukan tindakan yang mengancam gangguan ketertiban dan keamanan lapas.

Kendati demikian diperlukan program khusus agar dapat menembus paham radikalisme yang melekat pada diri narapidana teroris. Berangkat dari asumsi dari radikalisme adalah terorisme merupakan suatu perilaku berdasarkan pada sikap radikal yang berubah dari waktu ke waktu, bergantung pada kondisi internal dan eksternal individu serta dapat dipelajari ulang untuk mengurangi / menghilangkannya melalui sebuah intervensi pelatihan, maka memerlukan adanya inovasi dalam sistem deradikalisasi yang dilakukan salah satunya dengan melekatkan intelejen pada program deradikalisasi.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara, pengertian intelejen adalah pengentahuan, organisasi dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendektiesian dan peringatan diri dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Pengertian intelejen sebagai kegiatan adalah segala aktivitas yang dibutuhkan oleh lembaga intelejen atau seseorang atas perintah lembaga intelejen yang bertujuan untuk pengumpulan bahan keterangan untuk diproses dalam bentuk deteksi dini, peringatan dini, perkiraan kemungkinan bentuk ATHG (ancaman, tantangan, hambatan, dan rintangan) serta pengamanan dan penggalangan, yang dilakukan secara tertutup maupun terbuka dalam rangka pengamanan terhadap kepentingan nasional.

Tujuan intelejen dilekatkan pada program deradikalisasi dengan tujuan penggalangan dan deteksi dini. Pengertian penggalangan itu sendiri adalah segala langkah dan upaya agar kondisi lingkungan, apakah itu perorangan atau masyarakat, menjadi kondusif bagi pelaksanaan tugas atau bagi upaya pencapaian target-tujuan (Soegirman, 2012).

Penggalangan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan langkah, utamanya adalah langkah-langkah yang bersifat persuasif dan lunak berdasarkan pendekatan psikologis. Adapun penggunaan bentuk yang bersifat paksaan, apalagi kekerasan, sejauh mungkin dihindari, karena cara seperti ini tidak akan efektif dan bertahan lama, bahkan dapat kontraproduktif.

Adapun pada pelaksanaan intelejen yang dilekatkan pada proses deradikalaisasi haruslah dilakukan oleh orang atau pihak yang tentunya

berkompeten dan memiliki karakteristik profesi karakteristik profesi adalah sifat, watak, dan perilaku individu yang ditampilkan secara konsisten dan konsekuen, sehingga memberikan identitas khusus terhadap pekerjaan yang dalam pelaksanaannya memerlukan keahlian, keterampilan, kaidah, dan etika khusus yang berlaku dalam lingkup pekerjaan tersebut (Soegirman, 2011)

Dalam pelaksanaan intelejen yang perlu diingat adalah kata-kata dari Irawan Sukarno yang merupakan seorang Jenderal dan intelejen senior yang pernah menjabat beberapa Deputy KA BAKIN dalam beberapa periode antara 1970-an hingga 1990-an, yang kata-katanya berupa:

“Jangan mengharap, apalagi memaksa ular menerkam. Demikian pula jangan mengaharp, apalagi memaksa harimau membelit. Karakteristik ular adalah membelit bila melumpuhkan lawan bukan menerkam, sedang karakteristik harimau adalah menerkam bila melumpuhkan lawan, bukan membelit.”

Untuk melaksanakan intelejen dalam deradikalaisasi perlu dilakukan dalam pentahapan pencarian seseorang dalam pelaksanaannya caitu dengan cara rekrutmen. Rekrutmen adalah sebuah proses pembinaan terhadap seseorang yang dilakukan oleh pihak yang bertindak demi kepentingan lembaga intelejen untuk menjadi anggota jaringan tertutup dari lembaga intelejen tersebut dalam rangka pencapaian misi tertentu dengan kondisi tertentu yang disepakati kedua pihak (Soegirman, 2012).

Hasil studi yang dilakukan oleh Sarwono dan tim pada tahun 2009 menimbulkan pertanyaan besar. Beberapa narapidana teroris yang pada saat itu (tahun 2009) dijadikan partisipan dalam penelitian memberikan pernyataan yang berbeda dengan apa yang telah dilakukan yakni tindakan yang berkaitan dengan terorisme.

Seperti halnya Abu Dujana dalam wawancara pribadi, menyatakan tidak sependapat dengan Bom Marriott II (2009). Ia mengatakan “Saya tidak akan menyalahkan mereka (pelaku Bom Marriott II) karena mereka seharusnya memiliki alasan sendiri. Namun, hal itu tidak berguna dan memberikan kita (muslim) lebih banyak efek negatif daripada positif. Kita harusnya belajar dari Nabi Muhammad. Nabi berkata, ketika kita berada dalam posisi lemah, kita harus bersabar. Kita harus kuat sebelum kita membuat tindakan apapun. Nabi Muhammad sendiri mundur (hijrah) ke Madinah ketika posisinya lemah, dan kembali lagi untuk menaklukkan Mekah dengan cara yang damai setelah ia kuat. Kita harus gigih (istiqomah) dan berpikir positif, kemudian dengan kehendak Allah, hasilnya akan maksimal”

Narapidana teroris lain, Sueb yang ditangkap di Ambon, di tengah perang antara orang Kristen dan Muslim, mengatakan “Bukan karena saya radikal atau antipemerintah. Tetapi, jika kamu ada di sana (Ambon), ketika konflik terjadi,

kamu sebagai seorang muslim tidak dapat menghindar untuk tidak terlibat. Mustahil, ini masalah hidup dan mati.”

Haris yang juga partisipan lain dari Poso, menyatakan “Ketika konflik Poso pecah, saya telah tinggal dan bekerja di sana. Saya tidak memiliki pendidikan Islam radikal atau latar belakang demikian. Banyak hal yang ingin saya jelaskan, tetapi Anda fasilitator, akankah memahami saya. Dalam diskusi ini amatlah nyata Anda salah memahami kami. Jadi saya memilih untuk tetap diam.”

Di Tangerang terdapat empat narapidana teroris, yakni Rauf, Widi, Agus dan Junaedi. Mereka bukanlah mantan Afganistan dan tidak pernah berada di Afganistan. Mereka hanyalah alumni Ngruki. Mereka mengatakan “Kami tidak setuju dengan pengeboman. Kami tidak melakukannya. Kami ditangkap karena merampok bank di Banten, yang merupakan fa’i atau kegiatan mengumpulkan dana demi perjuangan Islam. Dana itu seharusnya untuk dikirimkan ke Poso dan kami tidak tahu bahwa uang itu digunakan untuk mengebom orang-orang di Bali. Kami bukanlah musuh dari non-muslim. Kami bahkan tidak menyebut mereka sebagai orang kafir. Kami tidak mungkin menyerang non-muslim yang berdamai dengan kita. Bahkan kita membaur dengan narapidana kulit putih di Bali. Kami juga tidak memiliki masalah dengan Pancasila, sejauh itu tidak memaksa kami.” (R. Sarwono et al., 2013).

Hasil studi tersebut memunculkan pertanyaan pernyataan manakah yang benar dan adakah bukti yang bisa menjadikan kebenaran atas pernyataan mereka. Dalam penggalangan informasi ini diperlukannya pelaksana yang memiliki dasar intelegen agar tidak terpengaruh dan bisa mengelabui narapidana teroris sehingga kebenaran bisa terungkap. Tantangan terberat ketika pelaksana deradikalisasi saat berhadapan langsung dengan narapidana teroris, sebagaimana diketahui komunikasi merupakan media para teroris dalam menyebarkan ideologinya. Tidak dapat dipungkiri juga, beberapa aparat sipil negara dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan upaya deradikalisasi bahkan terkontaminasi doktrin dari narapidana teroris yang bersangkutan sehingga menjadikan suatu “bumerang” bagi para pelaksana upaya deradikalisasi.

Namun salah satu hasil terpenting dari studi yang telah dilakukan adalah bahwa tim peneliti telah mengatur untuk memersuasi semua partisipan agar terlibat dalam 12 diskusi, dari awal hingga akhir, tanpa tanda penyangkalan atau penolakan apapun. Meskipun terdapat sedikit keraguan di awal sesi, khususnya berkenaan dengan tes tertulis dan buku tersebut, para partisipan memutuskan untuk tidak keluar dari rangkaian diskusi hingga akhir.

Hal tersebut menggambarkan bahwa para mantan teroris bekerja sama dan berkeinginan untuk mendengarkan dan mendiskusikan topik, bahkan ketika tidak sesuai dengan opini mereka sendiri. Kata kunci “bersedia

mendengarkan”, merupakan hasil yang sangat signifikan karena sejauh ini banyak orang, termasuk ahli tidak yakin teroris “bersedia mendengarkan.”

Kemudian, setelah “bersedia mendengarkan” berikutnya adalah “bersedia berbagi”. Dengan berbagi opini, kesempatan untuk mengubah pandangan telah terbuka, mengubah pikiran dan sikap juga dimungkinkan. Akan tetapi, dinamika psikososial dalam kelompok lebih besar berbeda dari wawancara tatap muka. Dalam kelompok lebih besar, terdapat tekanan sosial. Partisipan senior cenderung untuk menjaga pandangan radikalnya demi menunjukkan ideologi pikirannya kepada junior. Di lain pihak, para junior cenderung mengikuti pemimpin mereka, untuk menunjukkan rasa hormat, dan sebagainya..

Kesimpulan

Apabila ditarik garis besar dari apa yang tengah dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan terkait penanganan narapidana teroris yakni deradikalisasi sudah merupakan upaya yang maksimal terutama dari segi Standar Operasional Prosedur yang telah dibentuk sedemikian rupa salah satunya dengan penempatan narapidana teroris sesuai dengan kategori sesuai dengan hasil asesmen. Kemudian perbedaan perlakuan antara narapidana teroris satu dengan narapidana teroris lainnya berbeda sebagaimana pembinaan dengan penerapan konsep perlakuan individualisasi. Namun upaya-upaya harus terus dilakukan guna pelaksanaan pembinaan narapidana teroris dapat tepat sasaran sesuai dengan tujuan pembinaan itu sendiri. Sebagai bentuk mengoptimalkan upaya deradikalisasi salah satu dengan pembinaan narapidana berbasis intelejen yang diharapkan mampu membuka informasi dan mengatasi penyebaran deradikalisasi dari dalam lapas hingga luar lapas serta membantu dalam pengamanan nasional dalam bentuk pendeteksiandan peringatan diri dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional terkait tindakan terorisme.

Bibliografi

- Abbas, N. dan S. (2007). Laporan Silaturahmi dengan Mantan Teroris di Lapas dan Rutan se-Jawa. tidak diterbitkan. *Lembaga Penelitian Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia*.
- Atabay, S. B. dan T. (2016). *Hand Book on The Management of High Risk Prisoners (criminal justice handbookseries)*. Jakarta: UNODC.
- Hasanuddin Massaile, Dindin Sudirman, dan T. (2014). *Refleksi 50 Tahun Sistem Pemasyarakatan: Anatomi Permasalahan dan Upaya Mengatasinya*. Jakarta: Center for Detention Studies.
- Indonesia, P. (1995). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*.
- Indonesia, P. (2018). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018*.
- Sarwono, R., Sembiring, K. C., Kusuma, D. S., & Tursiloadi, S. (2013). Uji Kinerja Katalis Cu-Zno/Ai2o3 Yang Dipreparasi Dengan Metode Kopresipitasi Untuk

- Konversi Gliserol Menjadi Propanadiol. *Jurnal Kimia Terapan Indonesia (Indonesian Journal of Applied Chemistry)*, 15(1), 49–55.
- Sarwono, S. W. (2013). *Menakar jiwa mantan teroris melalui tes Davido CHaD*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Soegirman, S. (2011). *Majalah: Menembus Kabut Paska Pengesahan RUU – Intelejen, Cakrawala Edisi 17 Triwulan III*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan.
- Soegirman, S. (2012). *Profesi Unik Orang-Orang Aneh*. Cirebon: Media Bangsa.
- Zaltman, G., Kotler, P., & Kaufman, I. (1972). *Creating social change*. Newyork: Holt, Rinehart, and Winston